

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konsep

2.1.1 Perilaku Prolingkungan (*Environmental Behavior*)

Merujuk pada pendapat Pieters, Bijmolt, Van Raaij, & de Kruijk (1998) bahwa banyak orang mengatakan bahwa dirinya “environmentalis”, namun mereka tidak menterjemahkan sikap mereka tersebut kedalam perilaku prolingkungan. Satu alasan barangkali bahwa pilihan antara bertindak dalam sebuah cara prolingkungan dan tidak mengerjakannya begitu sering melibatkan sebuah konflik antara kepentingan individu yang segera dengan kepentingan kolektif jangka panjang. Keuntungan-keuntungan individu yang diperoleh dari perjalanan menggunakan mobil, membeli makanan dan produk lainnya tanpa pertimbangan dampak negatif lingkungan, tidak mendaur ulang, dan tidak menghemat energi dalam rumahtangga adalah kepentingan segera, sementara dampak negatif lingkungan seperti perilaku tersebut diatas menyebabkan situasi tidak menentu dimasa datang (Nordlund, dan Garvill, 2002 p.741).

Garvill, Laitila, & Brydsten (1994), Nordlund & Garvill (1999), Vlek & Michon (1992) mengatakan bahwa melakukan perjalanan dengan mobil lebih menghemat waktu dan lebih mudah serta menyenangkan, tetapi memiliki dampak negatif yang banyak terhadap lingkungan seperti polusi udara, kebisingan, dan konsumsi yang tinggi terhadap energi yang tidak terbarukan. Pada beberapa studi pemilik mobil merasa bahwa mobil lebih baik dan lebih unggul dibanding bus atau sepeda bila dikaitkan dengan kepentingan individu tetapi berakibat buruk bila dikaitkan dengan dampak lingkungan. Mereka juga merasa bahwa manfaat untuk individu lebih penting daripada manfaat untuk orang banyak (Nordlund, 2002 p.741). Hal ini benar bila kita melihat kecenderungan orang kota yang menggunakan mobil ketika hendak ke kantor, kampus, atau ke pasar swalayan. Mereka merasakan betul manfaat sebuah mobil, selain praktis juga lebih menghemat tenaga dan waktu bila dibandingkan harus naik bus atau sepeda. Dengan menggunakan mobil mereka dapat membawa keperluan pribadi lebih banyak dan tidak perlu menghisap polusi udara yang tersebar, sebaliknya justru memberi kontribusi bagi peningkatan emisi udara yang dihasilkan oleh mobil

mereka. Kondisi ini akan lebih diperparah apabila setiap orang memiliki satu mobil dan satu supir dan tidak adanya kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi kepemilikan mobil pribadi. Hal ini berbeda apabila orang lebih sering menggunakan kendaraan umum seperti bus, busway, taksi, atau kereta yang akan menekan jumlah emisi karbon ke udara. Namun menggunakan kendaraan umum bagi sebagian orang tidak praktis dan banyak menyita waktu serta mengurangi kenyamanan, apalagi bila harus menggunakan sepeda yang tidak mengeluarkan emisi udara dan si pengendara harus mengeluarkan keringat sebelum sampai ke tempat tujuan.

Kesadaran lingkungan lain yang menjadi sorotan adalah tentang mendaur ulang sampah. Walikota di Jakarta Timur mengatakan: "Sudah waktunya masyarakat berpartisipasi ikut mengolah sampah dengan memilah sampah dan memanfaatkannya menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomis. Jika tidak demikian maka wajah kota ini akan buruk dan tidak nyaman lagi untuk dihuni". Kondisi persampahan di Jakarta Timur ini sangat ironis bila mengingat bahwa Jakarta Timur adalah salah satu Kota Metropolitan peraih Adipura tahun 2007. Walikota menambahkan: "Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan non-organik juga masih rendah. Tidak adanya pemilahan ini memperpanjang waktu pengolahan sampah" ("Kompas", 2007).

Beberapa ahli lingkungan seperti Ebreo, Hersley, & Vining (1999), Mc Carty & Shrum (1994), Vining & Ebreo (1990), Werner & Mkela (1998) menyebutkan bahwa mendaur ulang sampah adalah wujud penting dari manajemen sampah padat tetapi seringkali orang mengatakan sampah adalah sesuatu yang kotor dan menyita waktu untuk mengelolanya, oleh karenanya mereka enggan untuk melakukannya (Nordlund, 2002). Sementara Mc Carty & Shrum (1994), Vining & Ebreo (1990) mengatakan bahwa mendaur ulang memerlukan upaya seseorang dalam menyortir sampah rumahtangga dan mengangkutnya ke beberapa sarana daur ulang. Mendaur ulang juga melibatkan penggunaan kembali dan perbaikan peralatan seperti pakaian dan perabotan. Rumahtangga disibukkan dengan usaha ekstra jika semua sampah rumahtangga dibuang dalam tempat yang sama. Mendaur ulang bagaimanapun memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan dampak sosial positif jangka panjang

seperti penghematan sumberdaya dan suatu upaya mengurangi penggunaan barang dalam manajemen sampah (Nordlund, 2002 p.741).

Konsumsi yang bertanggung jawab secara lingkungan adalah bentuk lain dari perilaku nyata bernuansa lingkungan. Konsumen dapat memilih untuk membeli barang bebas pakai untuk membeli barang yang diproduksi secara ekologis. Beberapa produk mungkin dihindari karena berbahaya bagi lingkungan seperti tong-tong plastik bekas bahan kimia yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum menggunakan. Konsumsi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat mengurangi jumlah sampah rumah tangga. Menjadi konsumen yang bertanggung jawab mungkin memerlukan biaya karena barang tersebut sering lebih mahal dan tidak selalu tersedia di pertokoan.

Masyarakat modern tergantung pada pemakaian energi.. Bukti-bukti dari konsumsi yang berlebihan terhadap energi yang tidak dapat diperbarui ini mengharuskan kita untuk mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi. Bagaimanapun pengurangan penggunaan energi mungkin menghasilkan apa yang dipertimbangkan oleh banyak orang sebagai sebuah standar hidup yang rendah.

Selain itu, terbentuknya gas rumah kaca juga disebabkan oleh penggunaan energi. Masyarakat modern tergantung pada pemakaian energi. Masyarakat di belahan bumi yang mengalami empat musim mengkonsumsi energi untuk memanaskan rumah mereka dan penggunaan listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga. Sebaliknya di negeri tropis pemakaian *air condition* (AC) telah menyedot banyak energi listrik. Pendingin ruangan di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta, misalnya, menyedot listrik paling banyak, yaitu rata-rata 60 persen dari total pemakaian listrik ("Kompas", 2008).

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang berkali-kali menghadapi pilihan dimana keputusan mereka memiliki dampak positif bagi mereka sendiri dan dampak negatif bagi lingkungan, atau dampak negatif bagi mereka sendiri dan dampak positif bagi lingkungan. Untuk menstimulasi perilaku lingkungan masyarakat, sebuah pemahaman yang lebih baik terhadap factor-faktor psikologis yang mempengaruhi keinginan mereka untuk bertindak dalam bentuk dan cara prolingkungan adalah penting.

Beberapa kebiasaan sosial yang lebih maju dan menjadi bagian dari perilaku prolingkungan ini berdasarkan ukuran yang dibuat Nordlund dan Jorgen Garvill (2002) terdiri dari empat bagian dan duapuluh lima item, yakni: (1) perilaku yang ditunjukkan dalam domain yang berbeda, seperti mendaur ulang plastik, kertas, metal; (2) konsumsi yang bertanggung jawab secara lingkungan, seperti membeli produk-produk ramah lingkungan; (3) penghematan energi, seperti kebiasaan menghemat air panas; (4) perilaku transportasi, seperti menggunakan angkutan umum ketimbang mobil pribadi. Untuk kondisi di Indonesia, item-item tersebut dapat lebih disederhanakan sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat di kota atau daerah-daerah.

Selain itu menurut Schultz and associates (2001). Responden ditanyai tentang berapa sering melakukan 8 perilaku spesifik setahun terakhir, yakni: (1) Menggunakan kembali barang-barang bekas pakai (*reuse*); (2) Mengolah kembali surat kabar; (3) Membeli produk-produk dalam kemasan-kemasan yang bisa digunakan kembali atau diolah kembali; (4) Mengolah kaleng atau botol; (5) Mendorong teman-teman/keluarga untuk mengolah barang-barang bekas pakai; (6) Memungut sampah yang bukan anda hasilkan; (7) Mengkomposkan sisa-sisa makanan; (8) Menghemat bahan bakar dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Selain itu *United Nation Development Program* (UNDP) juga mengajukan 21 panduan hidup berkelanjutan yang terkait dengan perilaku prolingkungan buku yang berjudul *The Geneva Guide to Sustainable Living* (lihat Lampiran 2).

Dengan demikian berdasarkan konsep para ahli dan panduan dari UNDP tersebut penulis mencoba memberi batasan bahwa perilaku prolingkungan (*proenvironmental behavior*) adalah tindakan seseorang terhadap lingkungan hidup yang berkaitan dengan perilaku upaya memanfaatkan kembali barang bekas, mendaur ulang sampah/limbah, mencegah terjadinya sampah/limbah, konsumsi yang bertanggung jawab terhadap sumberdaya alam, upaya konservasi energi, serta perilaku transportasi yang cenderung bebas emisi udara.

2.1.2 Latar Belakang Sosiodemografi

Di negara-negara maju dimana kesadaran masyarakat (*environmental awareness*) perkotaan sudah tinggi, perilaku prolingkungan bukanlah menjadi permasalahan. Hanya ironisnya perilaku penggunaan energi yang berlebihan

kadangkala kurang disadari, namun hal tersebut dapat dimaklumi bahwa di negara-negara yang memiliki empat musim harus menggunakan energi lebih besar ketika terjadi musim dingin. Di negara-negara berkembang yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, permasalahan lingkungan perlu diatasi antara lain dengan mendorong perilaku lingkungan yang lebih baik. Bahkan di Indonesia “rangsangan” agar sebuah kota menjadi lebih bersih, indah dan sehat diwujudkan dalam sebuah bentuk penghargaan yang disebut Adipura dan diberikan setiap tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok-pokok pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup....”, kemudian pasal 7 ayat 1: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”. Disini mengartikan bahwa pembinaan dan pengembangan peranserta masyarakat menjadi perlu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas peranserta itu sendiri. Dengan demikian diharapkan penghargaan Adipura bukan hanya penghargaan atas karya suatu pemerintah kota saja tetapi juga perlu melihat sejauhmana masyarakat diberdayakan dalam program kebersihan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada bab IX tentang peran masyarakat khususnya pasal 28 menyebutkan:

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/ atau pemerintah daerah
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Frey (2000) berkesimpulan bahwa keberadaan masyarakat erat kaitannya dengan struktur masyarakat, dan sesungguhnya bahwa struktur sosial dari sebuah bangsa dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Dia membedakan analisis yang dilakukan Inglehart dan Dunlap. Sebagai contoh Inglehart menyatakan bahwa kemiskinan dan ketidakmerataan mengurangi kepedulian terhadap kualitas lingkungan. Namun analisis yang dilakukan Dunlap tidak mendukung pendapat ini, tetapi analisis ini dibutuhkan. Kemiskinan diukur melalui produk nasional per kapita. Tetapi distribusi pendapatan dan lahan mungkin lebih penting daripada pendapatan agregat. Disini terdapat perbedaan pendapat antara Inglehart dan Dunlap namun keduanya menganggap analisis tersebut penting. Inglehart lebih mendekati dari sisi makro yang melihat kemiskinan diukur melalui produk nasional perkapita, sedangkan Dunlap lebih tertarik untuk melihat distribusi pendapatan dan lahan, dalam artian bahwa melihat kemiskinan tidaklah tepat bila diukur secara “pukul rata” namun harus melihat bagaimana distribusi pendapatan dan lahan itu terjadi di kalangan masyarakat.

Konsep Amin (1972, 1974, 1977) serta Strokes & Anderson (1990) tentang disartikulasi terkait dengan ketidakmerataan (ini biasanya disebut ketidakmerataan sektoral) dan mungkin memiliki keterkaitan kuat dengan dampak lingkungan (Frey, 2000). Akhirnya menurut Dietz, Stern, and Kalof (1993) ada bukti substansial bagi perbedaan gender dalam kepedulian lingkungan pada tingkat individu (Kalantari, 2007), dan ini mungkin diterjemahkan kedalam sebuah hubungan antara stratifikasi gender dan kebijakan lingkungan negara bangsa. Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Norris (2000) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku lingkungan. Perempuan secara umum lebih *concern* terhadap lingkungan daripada laki-laki. Dengan demikian kebijakan publik perlu memperhatikan stratifikasi gender.

Literatur yang ada terhadap persoalan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pendekatan mengidentifikasikan sikap dan perilaku lingkungan sebagai fenomena multidimensi (Tuna, 1994). Studi-studi tersebut menunjukkan beberapa faktor yang secara konsisten berkaitan dengan perilaku lingkungan. Menurut Buttel dan Taylor (1999) prediktor yang paling kuat dan konsisten

terhadap perilaku lingkungan adalah *umur*, dan menurut Caiazza, A and Barret (2003) hubungan antara gender dan *concern* lingkungan juga demikian. Menurut Stern, et al (1998), wanita biasanya lebih perhatian daripada laki-laki, dan literatur menggali beberapa faktor antara. Satu diantaranya adalah perbedaan gender dalam pengalaman dan dampak sebagai orangtua. Bagi laki-laki, kedudukan sebagai orangtua menyebabkan kurang perhatian terhadap lingkungan, sementara wanita sebaliknya namun beberapa peneliti lain menemukan hal yang berbeda. Oleh karenanya tidak ada perbedaan yang jelas antara perbedaan gender dan sikap lingkungan, karena peneliti yang berbeda menggunakan sampel yang berbeda dalam setiap penelitian menemukan hasil yang berbeda pula.

Di sisi lain, pendidikan, ideologi politik dan tempat tinggal penduduk juga secara konsisten terkait dengan *concern* lingkungan (Arcury, 2000). Terkait dengan variabel struktur sosial lainnya, seperti kelas sosial dan pekerjaan terdapat hubungan yang lemah, secara statistik jarang signifikan, dan menunjukkan pola tidak konsisten pada lintas studi.

Jones dan Dunlap (1992) menyebutkan dua hipotesa penting tentang basis sosial dari kepedulian lingkungan (Frey, 2000). Hipotesis pertama yang dikenal dengan sebutan *The Broadening Base Hypothesis* mengatakan bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah menyebar dalam masyarakat sekian tahun yang lalu yang berdampak pada dukungan yang lebih luas bagi proteksi lingkungan. Hipotesa kedua yang dikenal dengan sebutan *The Economic Contingency Hypothesis* menyatakan bahwa suatu usaha memperluas basis sosial dari kepedulian lingkungan tergantung pada kondisi ekonomi, dan bahwa selama masa-masa sulit itu siapa-siapa yang paling tidak diuntungkan secara ekonomi akan menggeser secara tidak proporsional prioritas mereka dari kualitas lingkungan ke ekonomi yang lebih baik.

Hipotesis pertama menyebutkan bahwa bila pendidikan, *income*, gender (dalam hal ini jenis kelamin perempuan), dan prestise yang rendah maka kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) juga akan rendah. Tapi seiring berjalannya waktu perbedaan struktur tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Kesadaran lingkungan sudah menyebar luas tidak melihat status social ekonomi, kelas dan gender karena permasalahan lingkungan sudah mengancam

semua lapisan masyarakat. Sedangkan pada hipotesis kedua terlihat lebih menekankan pada aspek ekonomi dimana pada kondisi ekonomi yang buruk hubungan antara latar belakang sosial dengan kesadaran lingkungan sangat kuat. Pada kondisi tersebut masyarakat tidak lagi memperhatikan lingkungannya dan tidak memberikan dukungan bagi proteksi lingkungan dan lebih memprioritaskan pada tujuan ekonomi mereka sehari-hari.

Dari hasil penelitian National Opinion Research (NORC) (Frey, 2000) bahwa tidak ditemukan bukti pada dua dekade terakhir dari sebuah perhatian lingkungan yang didasarkan pada aspek sosial itu apakah korelasi bivariat bagi variable-variabel sosiopolitik individu atau korelasi berganda variable-variabel ini dengan perhatian terhadap lingkungan. Demikian pula bahwa sejumlah kejadian fluktuasi ekonomi lebih dari 18 tahun tidak ditemukan bukti sebuah kecenderungan bagi sektor-sektor yang tidak menguntungkan secara ekonomi dalam masyarakat untuk mengurangi secara tidak seimbang tingkatan perhatian mereka terhadap lingkungan baik dalam kondisi ekonomi sedang buruk atau ekonomi sedang dalam kondisi baik.

Dalam penelitian ini peneliti cenderung melihat hipotesis kedua yakni *The Economic Contingency Hypothesis*, sebab penulis masih beranggapan bahwa orang-orang di Indonesia cenderung berperilaku pro lingkungan karena factor ekonomi, seperti misalnya mengapa si A lebih cenderung naik kendaraan umum ketimbang naik mobil pribadi? Barangkali masyarakat Indonesia yang masih terbatas tingkat pendapatannya akan menggunakan kendaraan umum, namun ketika tingkat pendapatan sudah meningkat maka mereka akan menggunakan kendaraan pribadi, padahal menggunakan angkutan umum cenderung lebih pro lingkungan.

Berbicara tentang masyarakat perkotaan dan lingkungannya erat kaitannya dengan lingkungan hidup sosial, dimana lingkungan hidup sosial adalah suatu kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama. Lingkungan hidup sosial terdiri dari berbagai sub sistem yang disebut lingkungan sosial mikro dan lingkungan sosial makro. Pada tingkat ruang dan waktu yang sempit, seperti lingkungan rumah, pasar, tempat kerja, dikatakan sebagai lingkungan mikro, sedangkan

lingkungan makro merupakan gabungan dari semua lingkungan-lingkungan mikro dan umumnya berskala nasional.

2.1.3 Motif Lingkungan

Dikaitkan dengan nilai moral dan motif lingkungan, Stern dan Dietz (1994) telah menyajikan sebuah teori dasar nilai *concern* lingkungan dengan mengembangkan teori Schwartz (1977) tentang model norma aktivasi *altruisme*. Mereka berpendapat bahwa norma moral lingkungan dapat diaktivasi melalui nilai-nilai sosioaltruistik dan juga nilai-nilai *biospheric* dan *egoistic*. Mereka menyajikan sebuah klasifikasi *tripartite* orientasi nilai terhadap *concern* lingkungan. Nilai *altruistic* mempengaruhi orang untuk menganggap persoalan lingkungan atas dasar biaya atau manfaat bagi kelompok manusia (contohnya komunitas, kelompok etnik, atau seluruh umat manusia). Sebaliknya orang-orang yang menerapkan nilai-nilai *egoistic* menganggap persoalan lingkungan atas dasar pribadi. Dalam orientasi nilai *biospheric* orang menganggap persoalan lingkungan atas dasar biaya dan manfaat untuk ekosistem. Oleh karenanya menurut teori ini, *“tiga orientasi nilai yang berbeda, terhadap diri sendiri, makhluk lain dan biospheric dapat dibedakan, dan bahwa masing-masing dengan bebas mempengaruhi tujuan-tujuan untuk bertindak secara politis dalam memelihara lingkungan”* (Stern, Dietz, Kalof, & Guagano, 1995, p.1616). Secara khusus Schultz (2001) menggunakan 12 item sikap spesifik *concern* lingkungan meliputi *“Environmental Motive Scale (EMS)”* untuk menguji *tripartite*. Dua belas objek yang dinilai ini meliputi *concern* terhadap *biospheric* (tumbuh-tumbuhan, kehidupan laut, burung-burung, dan binatang), *egoistic* (saya, gayahidup saya, kesehatan saya, dan masa depan saya), dan *altruistic* (orang-orang di negara saya, semua orang, anak-anak, dan generasi masa depan).

Dengan demikian yang dimaksud dengan motif lingkungan dalam penelitian ini adalah tiga orientasi nilai pada diri seseorang terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari orientasi nilai terhadap diri sendiri, terhadap tumbuhan dan hewan, serta terhadap manusia lainnya.

2.1.4 Sikap Proteksi Lingkungan

Untuk melihat hubungan sikap dan latar belakang masyarakat dengan perilaku lingkungan, dapat dijelaskan bahwa dengan sikap lingkungan

(*environmental attitudes*) terbentuk sebagai sebuah indikator dan komponen perilaku lingkungan. Salah satu contoh sederhana menilai sikap seseorang dilihat dari tanggapan mereka terhadap upaya proteksi lingkungan yakni setuju atau tidaknya memberi sebagian penghasilan untuk mengurangi polusi atau sampah masyarakat. Apabila setuju maka sudah dianggap sikap tersebut mencerminkan sikap yang mengarah terhadap perilaku lingkungan. Ini tentu saja akan lebih baik apabila sikap tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku prolingkungan seperti melakukan upaya mendaur ulang (*recycling*) dan menggunakan kembali (*reuse*) produk-produk yang masih layak pakai, perilaku konsumsi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, penghematan energi, perilaku menggunakan sarana transportasi.

Ada banyak teori dan pendekatan empiris untuk menyelidiki sikap terhadap lingkungan dan literatur yang terkait. Sebagian besar studi yang terkait dengan persoalan ini telah ada sejak 1970 dan seterusnya ketika konseptualisasi sikap lingkungan sebagai sebuah konsep penelitian ilmiah mendapat perhatian khusus oleh peneliti (Dunlap, 1998). Dimensionalitas adalah satu dari faktor-faktor paling kritis dari studi sikap lingkungan. Peneliti-peneliti terdahulu melihat sikap-sikap lingkungan sebagai konsep uni-dimensi. Kemudian banyak studi mengeksplorasi multi-dimensi sikap-sikap lingkungan. Albrecht (1992) menggunakan faktor analisis dan menemukan tiga dimensi: “keseimbangan alam (*balance of nature*)”, “batas-batas pertumbuhan (*limits of growth*)”, dan “manusia diatas lingkungan (*man over nature*)”. Cluck (1997) mengambil data yang lebih luas di USA dan mengonsepsi sikap lingkungan sebagai sebuah konsep tiga dimensi, meliputi “*environmental worldview*”, “*environmental concern*”, dan “*environmental commitment*”. *Environmental worldview* menyajikan bentuk umum dan dasar environmentalisme responden. Bentuk environmentalisme ini menunjukkan persepsi umum responden tentang lingkungan, hubungan-hubungan antara lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan. *Environmental concern* menyajikan penilaian responden tentang hubungan antara lingkungan dan masyarakat dan hubungan antara individu dan lingkungan, serta persepsi responden tentang permasalahan lingkungan spesifik. *Environmental commitment*

menyajikan penilaian responden tentang persoalan komitmen bagi kualitas lingkungan yang lebih baik. Persoalan komitmen lingkungan dapat berarti keinginan untuk membayar pajak (retribusi) atau biaya bagi proteksi lingkungan yang lebih baik dan keinginan untuk mengurangi standar kehidupan untuk mencapai kualitas lingkungan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, sikap proteksi lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh pandangan yang baik terhadap lingkungan, memiliki optimisme terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, tidak keberatan dikenai tarif yang lebih tinggi demi lingkungan, dan memiliki pandangan positif terhadap tindakan pemerintah terhadap lingkungan.

2.1.5 Pengetahuan Lingkungan

Faktor lain seperti pengetahuan, walaupun pengaruhnya tidak meyakinkan, ada beberapa studi yang menyebutkan bahwa pengetahuan (*knowledge*) memainkan peranan penting dalam memperkuat hubungan perilaku dan sikap lingkungan dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan pandangan dan argumen yang mendukung kepercayaan dan perilaku mereka terhadap lingkungan (McFarlane & Boxall, 2003). Miller (1990) meneliti tingkat pengetahuan lingkungan bagi orang dewasa di Amerika. Miller melakukan survey dengan menginvestigasi pengertian publik tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di USA. Satu komponen studi menguji pengetahuan publik tentang hujan asam dan lapisan ozon. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya seperempat orang Amerika yang memiliki pengetahuan minimal tentang hujan asam dan lapisan ozon.

Sebuah survey lain dilakukan oleh the *Kentucky Environmental Education Center* (KEEC) yang mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku lingkungan pada tahun 2004. Survey ini ingin melihat apakah warga Kentucky dapat menjawab beberapa pertanyaan sangat mendasar tentang isu-isu yang berkaitan dengan kualitas air dan lahan. Survey ini juga ingin mengetahui sikap warga tentang isu lingkungan, seperti bagaimana sikap mereka dalam menjaga sumberdaya alam. Kemudian warga diminta untuk mengidentifikasi perilaku yang dapat memperbaiki lingkungan. Kesimpulan umum dari hasil survey tersebut adalah bahwa walaupun masyarakat mengerti fakta-fakta ilmiah isu lingkungan, namun pengetahuan tersebut tidak terkait dengan perilaku mereka terhadap lingkungan.

Menyesuaikan kondisi di Indonesia, pengetahuan lingkungan masih sangat terbatas di lingkungan masyarakat. Di sisi lain upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan lingkungan kepada masyarakat masih sangat terbatas. Namun akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai merasakan pentingnya mempunyai pengetahuan lingkungan. Perubahan iklim yang tidak menentu sekarang ini sebagai akibat pemanasan global sudah mulai diketahui masyarakat bahwa itu adalah salah satu unsur lingkungan yang perlu diketahui, apalagi perubahan iklim ini sangat mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari seperti melaut, dan bertani. Namun perlu diingat bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tidak harus dengan membiarkan mereka membaca sendiri namun harus dituntun dengan contoh perilaku dari instansi berwenang atau lembaga swadaya masyarakat, sebagai contoh bagaimana mengatasi pemanasan global tersebut dengan menanam pohon dan perilaku prolingkungan lainnya. Pohon berfungsi untuk mensuplai oksigen dan menyerap karbon yang menjadi sebab meningkatnya suhu bumi. Apabila praktek-praktek prolingkungan ini dilakukan maka akan lebih mudah dicerna oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis memberi batasan pengertian pengetahuan lingkungan dalam penelitian yaitu tingkat pemahaman yang dimiliki seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

2.1.6 Program Adipura dan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, dan nyaman adalah program Adipura, yakni sebuah program penilaian terhadap kota yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu sehingga layak mendapatkan penghargaan tersebut. Perlu didiskusikan apakah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan termasuk pula Adipura telah menyentuh sasaran sebenarnya, dan apakah kebijakan tersebut didorong oleh gerakan sosial (*social movement*) atau gerakan lingkungan yang tumbuh dari bawah sebagai akibat dari adanya permasalahan lingkungan di perkotaan? Bagaimana persepsi masyarakat tentang hal tersebut?

Terkadang terlihat bahwa kebersihan suatu kota hanya ”tampak luar”nya saja. Beberapa persoalan yang terjadi di kota seringkali terlupakan dan bahkan diabaikan karena dianggap tidak penting. Ironisnya, sebuah kota yang mendapat

penghargaan Adipura tidak luput dari bencana banjir yang salah satunya adalah belum terkelolanya sampah dengan baik, dengan demikian sampah yang "bersembunyi" dan tidak tampak ketika penilaian Adipura akan muncul dan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir.

Sudah sejak beberapa tahun silam dikumandangkan fenomena "bunuh diri ekologis" (*ecological suicide*) dan "bunuh diri perkotaan" (*urbicide* atau *urban suicide*). Disebut bunuh diri karena orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelola kota justru "melukai" atau "membunuh" kotanya dengan berbagai kebijakan yang merusak keseimbangan alam-manusia-lingkungan binaan. Budihardjo (2007) menyinggung sebuah buku *Urban Theory, A Critical Assessment* karya Short (2006) yang menyebutkan bahwa akibat kekurangpekaan para pengelola kota negara berkembang atas masalah lingkungan, muncul apa yang diistilahkan *wounded cities* atau kota-kota yang terluka. Kota menjadi tidak nyaman untuk kehidupan dan cenderung tidak berkelanjutan. "*Urban economic growth has been achieved at an unduly cost to the ecological environment*".

Di Indonesia program Adipura telah dilaksanakan selama beberapa tahun dan sempat terhenti ketika terjadi reformasi. Program tersebut kini dilanjutkan kembali dengan membagi kota yang dinilai menjadi 4 (empat) kategori kota, yakni: kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Ketentuan penilaian dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup setiap tahunnya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.

Dalam program Adipura disusun mekanisme pemantauan terhadap kota kabupaten/kota otonom yang menjadi obyek penilaian. Pemantauan dilaksanakan dengan asas netralitas dan obyektivitas. Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah tidak memihak kepada kepentingan siapapun, sedangkan asas obyektivitas adalah melakukan penilaian sesuai dengan kondisi nyata yang terdapat di lapangan dan selaras dengan pandangan publik.

Penghargaan ini cenderung lebih menilai kebersihan kota dari sudut pandang fisik kota seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, bahwa lokasi pantau antara lain: perumahan (menengah dan sederhana, dan pasang surut), sarana kota (jalan arteri dan kolektor, pasar,

pertokoan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, taman kota, hutan kota), sarana transportasi (terminal, stasiun, pelabuhan), perairan terbuka (sungai, danau, situ), sarana kebersihan (TPA dan tempat pembuangan sampah), serta pantai wisata. Perlu dipertanyakan apakah penilaian ini sesungguhnya sudah menyentuh hakekat kesadaran masyarakat (*public awareness*) yang menyebabkan sebuah kota menjadi bersih dan sehat.

Namun benarkah program Adipura ini merupakan program yang melibatkan kepedulian masyarakat kota secara luas? Benarkah pemerintah kota telah berupaya melibatkan masyarakat untuk berperanserta dalam kebersihan? Apakah itu merupakan instruksi pemerintah ataupun kesadaran yang datang dari dalam diri masyarakat sendiri? Pertanyaan ini penting mengingat perlunya penekanan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tanpa harus didominasi kepedulian yang dilakukan oleh pemerintah kota. Apakah upaya Adipura ini sudah selaras dengan Millenium Development Goals (MDG's) dimana salah satu tujuannya adalah menjamin keberlanjutan lingkungan (*ensure environmental sustainability*)?

Untuk keberhasilan program Adipura yang sesungguhnya perlu mensinergikan beberapa faktor antara lain program pemerintah, partisipasi masyarakat, peran swasta, dan peraturan perundang-undangan. Pada awal proposal ini telah disinggung Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan adanya hak dan kesempatan masyarakat untuk mengelola lingkungan. Namun dalam Undang-undang Penataan Ruang nomor 24 Tahun 1992 terdapat kelemahan dimana tidak adanya ketentuan tentang posisi tawar (*bargaining position*) dari masyarakat untuk ikut menentukan penataan ruang. Kota seringkali merupakan ladang pertempuran ekonomi (*economic battleground*), siapa yang memiliki kekuatan finansial, dialah yang akan menentukan wajah dan nasib kota. Tidaklah mengherankan jika banyak kota-kota dipadati mal, megamal, *department stores*, apartemen, dan bangunan-bangunan serba beton tanpa tersedia ruang terbuka hijau. Dengan demikian ketika sebuah kota dinilai kebersihannya, apakah hakikatnya kota tersebut benar-benar bersih dengan bangunan dan lapisan beton

atau kota yang "menyembunyikan" sampah atau "kebobrokan" lingkungan lainnya.

Beberapa peraturan diterbitkan seperti misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mengharuskan suatu proyek melakukan analisis dampak lingkungan sebelum proyek itu dijalankan. AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Selain itu juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran. Peraturan-peraturan tersebut perlu disinergikan dengan peraturan dan perundangan lainnya.

Melihat banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dan tidak dapat diimplementasikan perlu dipertanyakan sesungguhnya penilaian Adipura tersebut apakah telah menyeluruh dan komprehensif atau penilaian fisik kota semata tanpa melihat hakikat sebenarnya tentang kebersihan kota dan peranserta masyarakat yang sesungguhnya melalui perilaku prolingkungan? Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan juga pemerintah kota.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Masyarakat Perkotaan dan Perilaku Menyimpang

Memahami bagaimana sebuah kota berfungsi menjadi sangat penting dalam sosiologi abad kedua puluh. Mazhab Chicago, khususnya Robert Park (1864-1944) mendominasi studi perkotaan. Park mengembangkan apa yang disebutnya 'pendekatan ekologis', maksudnya adalah kota menyesuaikan dirinya dengan cara yang teratur sebagaimana proses-proses ekologi lingkungan. Kota terlihat seperti mekanisme pengurutan dan penggeseran dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami, menyeleksi penduduk secara keseluruhan individu-individu yang cocok untuk tinggal dalam wilayah dan lingkungan tertentu. Mazhab Chicago berminat besar pada interaksionisme simbolis yang berurusan dengan makna yang dilekatkan individu pada lingkungannya. Dengan kata lain, persoalan identitas dan sosialisasi, atau bagaimana orang mempelajari kebudayaannya dan memproduksinya.

Selain itu terkait dengan modernitas dan risiko, Giddens (1991) menyatakan bahwa modernitas adalah kultur berisiko. Ini bukan berarti kehidupan sosial kini lebih berbahaya dari dahulu; bagi kebanyakan orang itu bukan menjadi masalah. Konsep risiko menjadi masalah mendasar baik dalam cara menempatkan aktor yang berkemampuan spesialis-teknis dalam organisasi kehidupan sosial. Modernitas mengurangi risiko menyeluruh bidang dan gaya hidup tertentu, tapi pada waktu bersamaan memperkenalkan parameter risiko baru yang sebagian besar atau seluruhnya tidak dikenal di era sebelumnya. (Ritzer, 2007). Kemudian Barry (2007) membagi risiko kedalam 4 (empat) kategori, yakni: (1) risiko-risiko ekologi; (2) risiko-risiko kesehatan; (3) risiko-risiko ekonomi; dan (4) risiko-risiko sosial. Pada risiko ekologi akan ditemukan pemanasan global, kehilangan keanekaragamanhayati, penipisan lapisan ozon, dan kerusakan ekosistem.

Apa yang terjadi di dunia pada saat ini seperti terjadinya dampak pemanasan global yang luar biasa persis seperti apa yang dikatakan Ulrich Beck (1992) dalam bukunya *Risk Society: Toward a New Modernity* karya Ulrich Beck (Ritzer, 2007). Beck (1992) mengatakan: *Sebagaimana modernisasi melarutkan struktur masyarakat feodal abad 19 dan menciptakan masyarakat industri, modernisasi kini melarutkan masyarakat industri dan melahirkan tipe modernitas lain*. Dalam buku ini Beck menyampaikan tesis: kita kini menyaksikan bukan akhir, tetapi awal dari modernitas-yakni modernitas di luar rencana masyarakat industri klasik (Ritzer, 2007).

Tidaklah mengherankan bila contoh kehidupan modern saat menyebabkan risiko seperti yang dikatakan Barry. Seseorang menggunakan mobil untuk bekerja atau bepergian dengan alasan waktu, jarak, keamanan, dan kenyamanan. Namun di sisi lain pengendara mobil ikut memberi kontribusi bagi emisi udara gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan menimbulkan dampak ikutan berupa empat kategori risiko. Kemudian begitu banyaknya masyarakat modern yang tergantung akan pemakaian listrik, plastik, AC, kendaraan bermotor, dan penggunaan bahan serta material yang sulit dihancurkan oleh tanah.

Mengamati masyarakat dan perilaku pro-lingkungan (*proenvironmental behavior*) dalam paradigma keteraturan dari segi ontologis dan epistemologis adalah melihat realitas secara objektif, karena menuntut adanya independensi

dengan subjek yang diamati. Paradigma ini berakar pada positivisme Auguste Comte (1798 – 1857) yang mengedepankan bahwa pengetahuan manusia (*human knowledge*) harus berasal dari pengalaman inderawi dan empiris, bisa diamati (*observable*), dan bisa diukur (*measureable*). Oleh karena itu melihat hubungan antara masyarakat perkotaan dan perilaku prolingkungan mengutamakan kuantifikasi terhadap gejala-gejala sosial. Implikasinya dalam melihat hubungan tersebut menekankan pada angka, hipotesis dan hubungan kausalitas.

Dikaitkan dengan perilaku masyarakat perkotaan terhadap lingkungan adalah juga menganalogkan perilaku masyarakat yang prolingkungan dan perilaku yang tidak bersahabat dengan lingkungan atau perilaku menyimpang. Menurut Merton (1938), perilaku menyimpang adalah hasil dari disorganisasi struktural yang terjadi pada level masyarakat. Merton mengeksplorasi hubungan antara tujuan-tujuan kultural dan cara-cara struktural untuk memperoleh tujuan-tujuan tersebut. Sementara bila cara-cara untuk mencapainya dibatasi untuk beberapa orang saja maka akan menciptakan perilaku menyimpang yang meluas. Jadi menurut Merton, perilaku menyimpang tidak terkait dengan kepribadian, tapi peran respon terhadap bentuk-bentuk kondisi yang berbeda-beda antara keinginan-keinginan untuk berhasil yang universal dengan ketersediaan cara untuk mencapainya. Ketika masyarakat tidak lagi mengikuti kesesuaian antara norma-norma dan tujuan-tujuan budaya maka terjadilah apa yang disebut dengan anomie (Merton, 1968; 216). Anomie akan menciptakan perilaku menyimpang (*deviance*) dimana seseorang menggunakan segala cara, terkadang illegal, untuk mencapai kesuksesan materi (Ritzer, 1996). Perilaku penyalur obat-obat terlarang atau pelacur yang melakukan pekerjaan tersebut guna mencapai kesuksesan ekonomi dan menyebutnya sebagai perilaku menyimpang yang disebabkan oleh ketidakbertautan antara nilai cultural dan cara-cara struktur social mencapai nilai cultural itu. Inilah satu cara yang ditempuh fungsionalis structural dalam upaya untuk menjelaskan perilaku menyimpang dan tindak kejahatan. (Ritzer, 2003).

Terkait dengan pendapat Ritzer di atas bahwa penyalur obat-obatan menyebarkan racun ke lingkungan masyarakat, dan dia memperoleh keuntungan dari obat-obatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perilaku lingkungan, perilaku menyimpang dapat diumpamakan seseorang yang membuang emisi gas kendaraan

ke ruang public juga adalah menyebarkan racun. Demikian pula orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, merokok di tempat umum, mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa berfikir panjang untuk generasi mendatang, menggunakan produk-produk teknologi yang boros bahan bakar, perilaku praktis tanpa memperhatikan pentingnya cara-cara *reuse* (mengggunakan kembali) dan *recycle* (mendaur ulang) produk-produk dalam kemasan, mencemari lingkungan dengan buangan limbah yang merugikan orang lain di sekitarnya.

2.2.2 *Habitus dan Lingkungan*

Menurut Sosiolog Perancis Bourdieu (1990) perilaku perorangan yang juga dilakukan kebanyakan orang disebut dengan kebiasaan sosial atau *habitus*. Habitus adalah "struktur mental atau kognitif" yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Aktor dibekali serangkaian skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Melalui pola-pola itulah aktor memproduksi tindakan mereka dan juga menilainya. Secara dialektika habitus adalah "produk internalisasi struktur" dunia sosial (Ritzer, 2007 p.522).

Bourdieu melanjutkan bahwa kita sebenarnya dapat membayangkan habitus sebagai "struktur sosial yang diinternalisasikan yang diwujudkan". Habitus mencerminkan pembagian obyektif dalam struktur kelas seperti menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan sosial diduduki. Jadi habitus akan berbeda-beda, tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial; tidak setiap orang sama kebiasannya; orang yang menduduki posisi yang sama dalam kehidupan sosial, cenderung mempunyai kebiasaan yang sama. Dalam pengertian ini habitus dapat pula menjadi fenomena kolektif. Habitus memungkinkan orang memahami dunia sosial, tetapi dengan adanya banyak habitus berarti kehidupan sosial dan strukturnya tidak dapat dipaksakan seragam kepada seluruh aktor.

Bourdieu (1977) menyebutkan habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama periode historis yang relatif panjang: "habitus, yang merupakan produk historis, menciptakan tindakan individu dan kolektif dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah" (Ritzer, 2007 p.523). Kebiasaan individu tertentu

diperoleh melalui pengalaman hidupnya dan mempunyai fungsi tertentu dalam sejarah dunia sosial di mana kebiasaan itu terjadi. Habitus dapat bertahan lama dan dapat pula berubah dalam arti dapat dialihkan dari satu bidang ke bidang yang lain. Tetapi, ada kemungkinan bagi seseorang mempunyai habitus yang tak pantas, dan menderita apa yang disebut Bourdieu sebagai *hysteresis*. Contohnya adalah orang yang tercabut dari akar kebiasaan agraris dalam masyarakat prakapitalis-kapitalis masa kini. Kebiasaan yang diperoleh dalam kehidupan masyarakat prakapitalis tak akan mampu mengatasi dengan baik kehidupan di prakapitalis-kapitalis.

Selanjutnya, menurut Bourdieu (1977) habitus menghasilkan, dan dihasilkan oleh, kehidupan sosial. Di satu pihak, habitus adalah “struktur yang menstruktur” (*structuring structure*); artinya, habitus adalah sebuah struktur yang menstruktur kehidupan sosial. Di lain pihak, habitus adalah “struktur yang terstruktur” (*structured structure*); yakni, ia adalah struktur yang distrukturisasi oleh dunia sosial. Dengan kata lain, Bourdieu melukiskan habitus sebagai “dialektika internalisasi dari eksternalitas dan eksternalisasi dari internalitas” (Ritzer, 2007 p.523).

Tindakanlah yang mengantarai habitus dan kehidupan sosial. Di satu pihak, habitus diciptakan melalui praktik (tindakan); di pihak lain, habitus adalah hasil tindakan yang diciptakan kehidupan sosial. Bourdieu mengungkapkan fungsi perantara tindakan ketika ia mendefinisikan habitus sebagai “sistem yang tertata dan menata kecenderungan yang ditimbulkan oleh tindakan dan terus-menerus tertuju pada... fungsi praktis” (dikutip dalam Wacquant, 1989:42; lihat juga Bourdieu, 1977:72). Sementara tindakan atau praktik cenderung membentuk habitus, habitus, pada gilirannya, berfungsi sebagai penyatu dan menghasilkan praktik/tindakan (Ritzer, 2007 p.523).

Pada akhirnya menurut Bourdieu (1984a) habitus berfungsi “di bawah tingkat kesadaran dan bahasa, di luar jangkauan pengamatan dan pengendalian oleh kemauan” (Ritzer, 2007 p.524). Meski kita tak menyadari habitus dan cara bekerjanya, namun ia mewujudkan dirinya sendiri dalam aktivitas kita yang sangat praktis seperti cara kita makan, berjalan, berbicara, dan bahkan dalam cara membuang ingus. Kebiasaan atau habitus ini berperan sebagai struktur, tetapi

orang tak memberikan tanggapan terhadapnya atau terhadap struktur eksternal yang memengaruhi secara mekanis. Jadi, dalam pendekatan Bourdieu, kita menghindari keekstreman sesuatu yang baru yang tak teramalkan dan determinisme total.

Bila habitus dikaitkan dengan lingkungan, sebagai kebiasaan, perilaku itu berlangsung berulang dengan spontanitas sebagai salah satu cirinya, namun dalam proses pembentukan kebiasaan itu pada awalnya perlu ada sarana bantu untuk mengingat sehingga kebiasaan sosial itu akan muncul menjadi tindakan yang spontanitas. Contoh sederhana perilaku prolingkungan yang dapat menjadi kebiasaan sosial adalah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, atau perilaku yang lebih baik lagi, yakni *reuse* (menggunakan kembali), *reduce* (mengurangi pemakaian), dan *recycle* (mendaur ulang) barang-barang kemasan.

Berbicara tentang lingkungan (yang dalam hal ini diterjemahkan Ritzer dari kata *field*), Bourdieu (1992) melihat lingkungan sebagai sebuah arena pertarungan: “Lingkungan adalah juga lingkungan perjuangan.” (Ritzer 2007 p.525). Bourdieu, dikutip dalam Wacquant (1989) mengatakan bahwa struktur lingkunganlah yang “menyiapkan dan membimbing strategi yang digunakan penghuni posisi tertentu (secara individual atau kolektif) yang mencoba melindungi atau meningkatkan posisi mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri” (Ritzer, 2007 p.525). Lingkungan adalah sejenis pasar kompetisi di mana berbagai jenis modal (ekonomi, kultur, sosial, simbolik) digunakan dan disebar. Lingkungan juga adalah lingkungan politik kekuasaan) yang sangat penting; hierarki hubungan kekuasaan di dalam lingkungan politik membantu menata semua lingkungan yang lain. Menurut Bourdieu, Kapitallah yang memungkinkan orang untuk mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain (aspek negatif dari kapital, lihat Portes dan Landolt, 1996; Ritzer 2007) . Bourdieu membahas empat tipe kapital. Gagasannya berasal dari lingkungan ekonomi (Guillory, 2000:32; Ritzer 2007 p.525) dan arti *modal ekonomi* sudah jelas. *Modal kultural* meliputi berbagai pengetahuan yang sah. *Modal sosial* terdiri dari hubungan sosial yang bernilai antara individu. *Modal simbolik* berasal dari

kehormatan dan prestise seseorang. Dengan memiliki keempat modal tersebut seseorang lebih memiliki perilaku.

Dalam penerapan konsep habitus dan lingkungan, dapat diandaikan oleh Bourdieu (1984a) yang menghubungkan antara selera dengan habitus. Selera dibentuk oleh habitus yang berlangsung lama, bukan dibentuk oleh opini yang dangkal dan retorika. Preferensi seseorang terhadap aspek keduniawian kultur seperti pakaian, perabot rumahtangga, atau masakan pun dibentuk oleh habitus. Bahkan habitus ini cenderung "menempa kesatuan kelas tanpa sengaja" (Ritzer, 2007). Dengan demikian preferensi seseorang terhadap kepemilikan barang-barang yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca, seperti AC, kulkas, mobil, dan sebagainya, juga dibentuk oleh habitus.

Seperti telah dikemukakan di bab awal oleh Pieters, Bijmolt, Van Raaij, & de Kruijk (1998) yang menyebutkan bahwa banyak orang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang environmentalis, namun pada kenyataannya perilaku yang ditunjukkan sangat bertentangan dengan aturan lingkungan (Nordlund, 2002). Berapa banyak pejabat, orang-orang kaya, dan akademisi yang menyebutkan dirinya peduli lingkungan, namun orang tersebut memiliki banyak kendaraan pribadi, menggunakan pendingin ruangan (*air condition*) dan kulkas dalam jumlah berlebihan, menggunakan perabot rumahtangga yang terbuat dari meubel mahal yang tentu saja berasal dari kayu yang hidup puluhan tahun, menggunakan energi listrik berkali lipat dibandingkan dengan yang digunakan orang miskin. Berapa banyak manusia yang hidup dalam kemewahan tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan, padahal mereka sendiri menyadarinya. Namun dengan alasan praktis, ekonomis, dan menghemat waktu mereka tidak memperdulikannya. Semuanya bermuara kepada keuntungan diri sendiri, keluarga, dan keuntungan ekonomi. Apa yang telah mereka lakukan sebenarnya mempercepat terjadinya pemanasan global yang berakibat bencana bagi umat manusia. Inilah yang disebut dengan anomie menurut Merton, yakni ketika masyarakat tidak lagi mengikuti kesesuaian antara norma-norma dan tujuan-tujuan budaya. Anomie ini akhirnya akan menciptakan perilaku menyimpang (*deviance*) dimana seseorang menggunakan segala cara, terkadang illegal, untuk mencapai kesuksesan materi. Sesungguhnya pemerintah sudah mengeluarkan

berbagai peraturan yang seharusnya ditaati, selainnya itu di lingkungan masyarakat sendiri sudah ada semacam kearifan local (*local wisdom*) untuk mengalur hidup mereka bermasyarakat.

Solusi untuk mengatasi perilaku buruk terhadap lingkungan ini sebenarnya dapat diatasi melalui kebiasaan social. Terbentuknya berbagai kebiasaan sosial yang sesuai zaman adalah salah satu ukuran kemajuan sosial. Kemajuan sosial tidak hanya diukur dari hadirnya gedung-gedung bertingkat, kendaraan mewah, atau jalan tol. Semua infrastruktur tersebut apabila tidak disertai dengan kebiasaan sosial baru maka akan tetap disebut tertinggal. Oleh karenanya kebiasaan sosial adalah pencapaian sosial. Ia mengukur kemajuan masyarakat sebagai kebersamaan. Disini perlu adanya tanggung jawab pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembentukan berbagai kebiasaan sosial seperti adanya stiker pemilahan sampah basah dan sampah kering, stiker mengingatkan dilarang merokok ruangan tertutup atau AC, stiker mengingatkan orang untuk hemat air, listrik, menyayangi pohon, dan lain sebagainya. Namun perlu juga suatu “pemaksaan” agar “struktur” untuk membentuk kebiasaan sosial itu dilaksanakan oleh masyarakat misalnya dengan menegakkan peraturan berupa sanksi tertentu atau pengenaan disinsentif apabila adanya pelanggaran untuk macam kebiasaan sosial tersebut. Selain itu apa yang dilakukan pemerintah terhadap penghematan penggunaan energi yang tak terbarukan (*non renewable resources*) perlu terus dilakukan. Kelemahannya yang terjadi di Indonesia adalah terkadang penegakan peraturan tersebut tidak konsisten dan tidak berlanjut. Selain itu masih lemahnya sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama dengan semua pihak terkait.

Memburuknya kualitas lingkungan suatu perkotaan atau daerah sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan lingkungan hidup di kota atau daerah tersebut. Di beberapa negara maju terlihat bahwa pengelolaan lingkungan sudah sangat maju dimana peran pemerintah sudah jauh berkurang. Propaganda pemerintah dalam pengelolaan lingkungan di negara-negara maju tersebut sudah merasuk ke hati masyarakat sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup sudah cukup tinggi. Di Jepang misalnya, pada tahun 1977-1990 pemerintah mengagagas Proyek Pencegahan Polusi yang memakan biaya 48.5 milyar yen (“Kompas”, 2009), yang diantaranya digunakan untuk mereklamasi

pantai Teluk Minamata seluas 58 hektar, yang kini menjadi Eco-park. Ini terkait dengan sejarah kelam kota Minamata yang identik dengan penyakit perusak sistem syaraf pusat manusia akibat kandungan metil merkuri di dalam tubuh. "Penyakit Minamata", yang kasus pertamanya diakui pemerintah pada 1 Mei 1956, membunuh 1.629 orang dari 2.268 korban. Hingga Juli 2007 tercatat 10.353 orang berobat rutin. Penyakit ini dipicu oleh logam berat yang masuk ke tubuh melalui ikan dan kerang dari teluk Minamata yang mereka konsumsi. Ini diakibatkan oleh buangan limbah sebuah perusahaan produsen pupuk kimia. Akibat yang diderita masyarakat selain dampak fisik juga putusya ikatan sosial.

Mencermati kondisi yang demikian, walikota bersama warga bekerja keras mengubah situasi. Mereka memasang standar yang tinggi terhadap kebersihan dimana sejarah mengajarkan pentingnya lingkungan dan kesehatan. Sesuai dengan konsensus warga Minamata pada tahun 1992, setelah cukup dibagi tiga jenis sampah, sampah kemudian dipilah menjadi 22 jenis, dan konsensus itu dipatuhi warga. Di sini terlihat adanya peran negara dengan gerakan sosial (*social movement*) yang dilakukan masyarakat yang akhirnya membentuk habitus.

Kondisi yang sama ditemui di Taipei, ibukota Taiwan (*Republic of China*) yang sebelum tahun 1984 warga masyarakatnya membuang sampah di sembarang tempat. Pemerintah kesulitan mengumpulkan sampah, dan kemudian membangun insinerator untuk menghancurkan sampah. Namun insinerator itu tidak mengurangi sampah secara signifikan. Abu dan endapan yang dihasilkan oleh pembakaran insinerator juga perlu pemecahan. Selain itu tidak semua sampah bisa dihancurkan oleh insinerator ("Kompas", 2008). Tahun 2000 pemerintah kota Taipei menemukan cara baru untuk membuang sampah. Pemerintah mendorong warganya untuk berperan aktif mengurangi sampah. Caranya, sampah harus dipisahkan sejak dari rumah. Petugas sampah pun untuk berani tegas kepada masyarakat. Warga yang tidak mengikuti peraturan, sampahnya tidak akan diangkut oleh petugas.

Contoh keberhasilan lain dalam pengelolaan perkotaan adalah seperti Curitiba di Brazil. Dalam buku *The Sustainable Urban Development*, Wheeler & Beatley (2004) bercerita tentang Curitiba yang disebut "One of the world's leading examples of creative urban development" (Budihardjo, 2007). Diawali

dari sebuah kota metropolitan yang tumbuh dengan sangat pesat, Curitiba menghadapi masalah yang tidak berbeda dengan kota-kota di negara berkembang yang kumuh, macetnya lalu lintas, menggunungnya sampah, banjir dan pembusukan lingkungan. Namun sejak arsitek Jarvine Lermer menjadi walikota tahun 1971 dan dibantu Jonas Rabinovitch dan Josef Leitman sebagai perencana kota yang visioner maka terjadi perubahan yang cukup drastis. Ini didukung oleh filosofi sederhana, yakni: *inovasi bersama penduduk, merancang bersahabat dengan alam, dan memanfaatkan teknologi tepat guna*. Filosofi tersebut diterjemahkan dalam bentuk insentif sehingga segenap warga melakukan dengan sepenuh hati bahkan menunjukkan perilaku positif. Warga mengumpulkan sampah, ditukar dengan karcis bus umum atau kupon makanan. Dampak yang terjadi dari kebijakan walikota adalah warga meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi yang menyenangkan. Sungai-sungai yang menjadi penyebab banjir ditata dengan tanaman menjadi taman, dilengkapi danau buatan penampung banjir dengan sistem *flood control* terpadu. Taman-taman dibuat dari lahan yang diakuisisi pemerintah kota. Ketentuan mengenai *building coverage* atau koefisien dasar bangunan diterapkan tanpa kompromi dengan aturan tegas. Konsep *polycentric* atau *multiple centres* dikembangkan dengan sistem transportasi publik.

Apa yang terjadi di Minamata, Taipei, dan Curitiba diawali dengan kebijakan pemerintah. Dikaitkan dengan penilaian Adipura, kebersihan fisik kota merupakan nilai utama dari penghargaan tersebut. Seperti misalnya untuk menilai lingkungan perumahan menengah dan perumahan sederhana, aspek yang dipantau antara lain lingkungan perumahan meliputi jalan utama dan gang, drainase, ruang terbuka hijau, dan tempat pembuangan sementara (TPS). Dikatakan bahwa untuk drainase tertutup tidak dilakukan penilaian, sedangkan TPS yang dinilai adalah ketersediaan atau bentuk fisik dan kebersihan sekitar TPS. Perlu dipertanyakan mengapa aspek penilaian benar-benar mengandalkan aspek fisik kota, bukan aspek non fisik seperti perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Penilaian adipura hanya menyentuh 'output' ketika keadaan lingkungan menjadi bersih, namun tidak melihat 'proses' mengapa kondisi lingkungan menjadi bersih? Siapa yang membersihkannya? Adakah sesuatu yang menjadi bersih itu melibatkan

partisipasi masyarakat seperti yang diinginkan pemerintah dalam membentuk habitus atau kebiasaan sosial? Adipura sebagai salah satu program lingkungan hidup tingkat perkotaan bertujuan baik, namun perlu dipertanyakan apakah program tersebut telah menyangkut 'kampanye sosial' seperti yang digaungkan pemerintah untuk membangkitkan kesadaran lingkungan. Seperti dikatakan sebuah harian ibukota: "*Jakarta bukan tidak mungkin menjadi kota yang bersih seperti Taipei. Hanya dengan kemauan dari pemerintah dan peranserta masyarakat impian menjadikan Jakarta sebagai kota kelas dunia di bidang kebersihan akan terwujud. Jangan hanya puas dengan Adipura karena kelasnya sangat lokal dan petugas hanya bekerja keras pada detik-detik penilaian Adipura*" ("*Kompas*", 2008)

Dikatakan bahwa perkembangan yang cepat dari gerakan pertumbuhan kesadaran lingkungan adalah sebuah refleksi dari problem lingkungan, namun ada juga hasil dari sebuah konstruksi sosial seperti yang terjadi di Korea (Wan, 2004). Menurut teori materialistik, atau "hipotesis refleksi", problem lingkungan yang terjadi adalah sebuah alasan utama untuk perkembangan kesadaran lingkungan dan gerakan lingkungan. Riley dan Dunlap dan pakar lainnya menekankan bahwa lingkungan adalah sesuatu yang penting, variabel bebas yang mempengaruhi perubahan sosial, sebuah prinsip sosiologi lingkungan (Catton & Dunlap 1978: 1980). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa salah satu persoalan lingkungan adalah pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia di bumi yang mengeluarkan emisi gas ke udara yang menghambat terpantulnya sinar infra merah ke langit sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat. Peningkatan suhu bumi ini akan menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan selatan serta menyebabkan terjadinya badai yang merusak kehidupan manusia di bumi. Peningkatan suhu dan terjadinya badai akan mempengaruhi aktivitas pertanian, ekonomi, industri dan lainnya yang merupakan sandaran pokok kehidupan manusia. Ketika persoalan lingkungan ini tidak teratasi maka akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan ikut mengubah pola kehidupan masyarakat yang selama ini telah terpola. Sejauhmana persoalan lingkungan tersebut dapat diatasi sangat tergantung pada pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak yang diberi amanah untuk menjalankan pemerintahan

mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintah masing-masing negara. Salah satu bentuk pengelolaan lingkungan tingkat dunia antara lain yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui konferensi perubahan iklim yang dilaksanakan di Bali Desember 2007. Perlu kesepakatan-kesepakatan tertentu untuk mengatasi persoalan lingkungan sebab sebagaimana telah disebutkan dalam tulisan sebelumnya bahwa perilaku penduduk perkotaan di negara-negara maju justru menjadi penyebab terjadinya pemanasan global di muka bumi.

Kebijakan lingkungan oleh pemerintah seharusnya tidak lagi dilihat secara parsial tetapi lebih holistik. Persoalan polusi, energi, dan *illegal logging* saling terkait. Semestinyalah seluruh pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (termasuk pemerintah kota) mengubah paradigma dari *economic determination* (penekanan pada ekonomi) ke *environment determination* (penekanan pada lingkungan). Implikasinya tentu saja bagaimana membuat kebijakan yang benar, contoh di perkotaan antara lain bagaimana mengurangi kontribusi karbondioksida, penataan tata ruang yang benar, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain kebijakan pemerintah, gerakan sosial dipandang perlu untuk menggerakkan masyarakat untuk peduli lingkungan. Gerakan sosial selalu terarah kepada perubahan sosial. Fenomena dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan telah tumbuh gerakan sosial yang memperhatikan lingkungan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berjuang untuk kepentingan lingkungan, namun tidak sedikit pula yang memiliki motif lain seperti unsur uang dan politik, sebab berdasarkan teori, kesempatan politik dan hubungan-hubungan kekuatan politik memelihara kemunculan strategi dan tenaga gerak bagi gerakan sosial (Tarrow, 1989). Struktur kesempatan politik yang terbuka dan pemberdayaan gerakan lingkungan yang kuat akan berdampak positif, seperti yang terjadi di Korea dan Jerman. Gerakan lingkungan di dua negara tersebut mengejar nilai-nilai hijau seperti menjaga lingkungan, menghargai hidup, dan demokrasi akar rumput dalam struktur sosial yang ada. Gerakan tersebut mempraktekkan politik hijaunya sendiri yang diperlihatkan melalui gerakan sosial dan membedakannya dari politik-politik lama berdasarkan pada kelas dan

kepentingan. Di Jerman bahkan telah terbentuk partai hijau yang memperjuangkan lingkungan dengan sebenarnya (Wan, 2004).

Organisasi non pemerintah misalnya dapat melakukan upaya menyesuaikan dampak perubahan iklim, seperti mengkampanyekan penggunaan hemat energi, penggunaan bahan bakar biodisel dari minyak jarak, serta membuat pembangkit listrik dengan sumber energi ramah lingkungan sinar matahari, angin, dan air. LSM-LSM tersebut dapat pula melakukan pelatihan-pelatihan baik untuk masyarakat, perusahaan dan perorangan yang akan menggugah semangat untuk bersikap dan berperilaku prolingkungan.

Selain terbentuknya LSM-LSM yang menyuarakan lingkungan dan bertindak menyelamatkan lingkungan seperti yang dilakukan *Greenpeace*, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan organisasi non pemerintah lainnya, adapula gerakan-gerakan yang dilakukan secara spontanitas seperti yang terjadi di Australia tanggal 11 Nopember 2007 dimana puluhan ribu orang ikut serta dalam pawai protes di beberapa tempat di Australia. Mereka menyerukan partai-partai politik untuk bertindak lebih kuat untuk mengatasi pemanasan global. Aksi "jalan kaki melawan pemanasan global" itu digelar di kota-kota negara bagian dan 50 kota lainnya, yang diperkirakan jumlahnya mencapai 150.000 orang. Para pemrotes tersebut menginginkan partai-partai politik di negara tersebut menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengurangi gas rumah kaca. Selama ini partai-partai utama dianggap gagal memberi komitmen soal pengurangan emisi gas rumah kaca.

Gerakan-gerakan sosial lingkungan dapat pula dilakukan bila dikaitkan dengan keagamaan seperti yang dilakukan di Bali. Umat Hindu menerapkan salah satu ajaran agamanya berupa Tri Hita Karana yang salah satunya menyinggung "hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan". Dibuatlah misalnya hari-hari yang khusus untuk menyayangi binatang (*tumpek kandang*), menyayangi tumbuh-tumbuhan (*tumpek uduh*), serta menyayangi senjata dan alat-alat kerja (*tumpek landep*). Hari-hari upacara khusus itu datang silih berganti setiap enam bulan sekali kalender Bali atau sekitar tujuh bulan kalender Masehi.

2.2.3 Signifikansi Penelitian

2.2.3.1 Teoritik

Studi perilaku prolingkungan sangat penting guna memberikan alternatif kontribusi pemikiran tentang bagaimana sebaiknya manusia berperilaku terhadap lingkungan. Ini terkait dengan pendapat sejumlah pakar halaman bab terdahulu bahwa penyebab kerusakan lingkungan ada perilaku manusia yang *maladaptive*.

Studi serupa di Jakarta belum penulis temukan, namun penelitian-penelitian yang lebih terfokus pada manajemen persampahan atau studi tentang perilaku masyarakat terhadap lingkungan dalam skala yang terbatas seperti di sekolah memang cukup mengemuka di beberapa perpustakaan yang penulis datangi.

Beberapa studi terdahulu di luar negeri banyak menggambarkan tentang gerakan lingkungan, concern lingkungan dan mengukur beberapa indeks perilaku dan sikap warga terhadap lingkungan. Hasil penelitian-penelitian tersebut menjadi masukan bagi penulis untuk merancang penelitian dengan cara peneliti sendiri namun mengambil beberapa substansi terkait dengan topik yang peneliti ajukan berkenaan dengan perilaku pro lingkungan.

Hasil penelitian yang diambil dari beberapa journal tersebut telah diringkas sebagai berikut:

1. Dalam jurnal yang berjudul *The Korean Environmental Movement: Green Politics through Social Movement (2004)* mengangkat pertanyaan: (1) Mengapa gerakan lingkungan tumbuh begitu cepat di Korea; (2) Bagaimana kondisi struktur dan proses mobilisasi sumberdaya dari “politik hijau melalui gerakan social” (*green politics through social movement*). Jurnal ini mencoba me-review kasus yang terjadi di Korea, Taiwan, China, Jerman, USA, dan Jepang. Kesimpulan dari jurnal tersebut menyatakan bahwa gerakan lingkungan di Korea berkembang karena problem lingkungan dan industrialisasi yang cepat. Ini lebih dari akibat proses sosial dan politik spesifik yang dihubungkan dengan reaksi populer dari permasalahan lingkungan. Kekuatan gerakan-gerakan lingkungan secara sosial mengkonstruksikan problem lingkungan dan membuat keterbukaan dalam struktur kesempatan politik terbaik. Dikaitkan dengan kenyataan di Indonesia apakah juga menggambarkan hal yang demikian masih perlu dikaji. Permasalahan lingkungan cukup serius terjadi terutama di perkotaan dan

daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan industri. Di Indonesia belum ada partai politik "hijau" yang menyuarakan lingkungan, justru lembaga swadaya masyarakatlah yang bisa menjadi penyeimbang pemerintah sebagai gerakan sosial lingkungan yang memperjuangkan kelestarian lingkungan. Apakah di Jakarta Selatan sebagai obyek penelitian ini sudah sedemikian rupa memiliki lembaga-lembaga yang memperjuangkan aspek lingkungan tersebut?

2. Jurnal yang berjudul *Attitudes Toward Environmental Issues in East Europe* (2000) mengangkat hipotesa: (1) Responden yang menjunjung tinggi nilai-nilai *post-materialist* cenderung untuk lebih sadar lingkungan; (2) Responden yang *concern* dengan lingkungan cenderung kurang percaya pada sistem politik. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif didasarkan pada "the World Values Survey" yang dilakukan pada 42 negara dari tahun 1990 sampai 1993. Hasil penelitian menggambarkan bahwa: (1) struktur dasar *concern* lingkungan di Eropa Timur sama dengan pola yang muncul di Eropa Barat. Variabel *umur lebih muda, pendidikan lebih baik, pendapatan lebih tinggi, orang-orang yang bekerja pada sector non-produktif* lebih mungkin untuk berorientasi pro lingkungan. Tetapi hanya pendidikan yang lebih tinggilah yang secara langsung mempengaruhi *concern* lingkungan; (2) Skala *concern* lingkungan menunjukkan korelasi yang lemah dengan nilai-nilai *post-materialist*, keterlibatan psikologis dalam politik, potensi protes, dan juga hubungan yang lemah untuk *sinisme* politik di lima negara; (3) Berdasarkan tujuan penelitian tidak terdapat perbedaan antara hasil analisis di Barat dan Timur untuk semua pola.

Penelitian yang akan dilaksanakan di Jakarta Selatan ini akan mencoba membandingkan substansi penelitian yang telah dibahas pada jurnal kedua ini, setidaknya melihat latar belakang faktor sosiodemografis terhadap perilaku prolingkungan.

3. Jurnal ketiga yang berjudul *Investigating Factors Affecting Environmental Behavior of Urban Residents: A case Study in Tehran City – Iran* (2007) mengangkat hipotesa sebagai berikut: (1) Umur, tingkat pendapatan, jabatan, pendidikan dan pengetahuan lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap sikap dan perilaku lingkungan; (2) Terdapat perbedaan signifikan antara

perilaku laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan sikap lingkungan; (3) Sikap masyarakat terhadap lingkungan, perasaan terhadap lingkungan (*feeling of stress*), kesiagaan masyarakat bertindak dan aturan lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap perilaku lingkungan masyarakat perkotaan.

Kesimpulan jurnal menyebutkan bahwa: (1) Tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sikap lingkungan, kesiagaan untuk bertindak, dan *feeling of stress*. Perempuan menekankan bahwa aturan lingkungan yang ada cukup untuk proteksi lingkungan, dan jika aturan disempurnakan maka problem lingkungan dapat dipecahkan. Tapi sebagian besar laki-laki percaya bahwa aturan ini tidak cukup kuat, dan seharusnya pemerintah membuat lagi aturan hukum untuk membuat masyarakat dan bisnis terbiasa untuk memproteksi lingkungan; (2) Terdapat perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku lingkungan. Perempuan secara umum lebih concern terhadap lingkungan daripada laki-laki. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh penelitian Caiazza dan Barret; (3) *Feeling of stress* antara masyarakat di Utara Tehran lebih tinggi daripada di Pusat dan Selatan. Karena perasaan ini, kesiagaan untuk bertindak bagi konservasi lingkungan masyarakat di Utara Tehran juga lebih tinggi. Kesimpulan ini juga berlaku dalam kasus top manager dan spesialis dibandingkan dengan pekerja; (4) Dari hasil analisis path dalam mengukur sikap dan perilaku, yang paling kuat bagi perilaku lingkungan berasal dari tingkat pendapatan, kesiagaan untuk bertindak, dan sikap lingkungan. *Feeling of stress*, aturan lingkungan dan sikap lingkungan juga mempengaruhi perilaku lingkungan melalui kesiagaan untuk bertindak. Pengaruh umur juga ditunjukkan oleh koefisien path tentang hubungan ini. Hubungan-hubungan tersebut dibuktikan dengan sejumlah studi yang dilakukan oleh *Hines et al, Vogel, Bamberg, Buttel dan Taylor, dan EORG*; (5) Pendidikan dan pengetahuan berbasis problem memiliki dampak tidak langsung terhadap perilaku lingkungan. Pendidikan dan penguatan pengetahuan berbasis problem penduduk Tehran dapat mengubah sikap lingkungan dan akan meningkatkan *feeling of stress* masyarakat kearah lingkungan. Perubahan-perubahan ini pada gilirannya

memperbaiki kesiagaan untuk bertindak secara bersahabat dengan lingkungan, khususnya dengan membantu aturan lingkungan. Semua ini dapat mengubah perilaku untuk memelihara lingkungan

Penelitian yang akan dilakukan di Jakarta Selatan juga mengkaji sikap dan tingkat pendidikan terhadap perilaku prolingkungan, demikian juga pengaruh tingkat pendapatan dan faktor sosiodemografis lainnya. Barangkali akan dapat ditemukan benang merah hubungan perilaku prolingkungan sebagai variabel terikat dengan variabel bebas lainnya.

4. Dalam jurnal keempat yang berjudul *A Cross Cultural Study of Environmental Motive and Their Implications for Proenvironmental Behavior* (2006) tidak menguji hipotesis khusus terhadap perbedaan budaya spesifik. Tapi lebih melihat: (a) bagaimana invarians pengukuran skala motif lingkungan (EMS); (b) bagaimana perbedaan cara-cara yang tampak dan tersembunyi dalam *concern* biosfer, *egoistic*, dan *altruistic* lintas kelompok, (c) bagaimana hubungan *concern* motif lingkungan ini dan perilaku pro-lingkungan yang timbul dari diri sendiri. Metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif: Kuesioner diedarkan kepada 658 mahasiswa (451 perempuan, 207 laki-laki) dengan cakupan umur 16 hingga 66 tahun. Komposisi etnik sample adalah 474 orang Selandia Baru asal Eropa dan 184 orang Selandia Baru asal Asia. Kesimpulan jurnal menggambarkan bahwa: (1) Model tripartite *concern* lingkungan memberikan kesesuaian baik sample orang Selandia Baru asal Eropa dan orang Selandia Baru asal Asia; (2) Penelitian ini juga konsisten dengan temuan terdahulu di 20 negara tentang model tripartite Schultz (2001); (3) Bagi orang-orang Selandia Baru asal Eropa dan Asia menilai dengan cara berbeda untuk item-item EMS dan kepentingan sama untuk masing-masing 3 item yang telah disebutkan. (4) Skor faktor *egoistic* orang Selandia Baru asal Asia secara signifikan lebih tinggi dari orang Selandia Baru asal Eropa, sebaliknya dalam *concern* biosfer skor Eropa lebih tinggi dari Asia, dan juga disebutkan bahwa orang Selandia Baru asal Eropa menilai persoalan lingkungan lebih atas dasar biaya atau manfaat untuk ekosistem, sebaliknya Asia menilai persoalan lingkungan lebih pada dasar pribadi (*egoistic*). Bagi Selandia Baru asal Eropa, *concern* biosfer secara positif memprediksikan

perilaku pro-lingkungan, sebaliknya *concern* egoistic memprediksikan secara negatif; (5) Bagi Selandia Baru asal Asia sebaliknya, *concern* biosfer dan altruistic memprediksikan positif perilaku pro-lingkungan. Ini juga berarti individu-individu dengan *concern* biosfer lebih tinggi, bebas dalam tradisi budaya mereka, memperlihatkan perilaku lingkungan yang lebih bertanggung jawab. Bagaimanapun peran *concern* untuk diri sendiri (*egoistic*) dan *concern* untuk yang lain (*altruistic*) bisa membedakan lintas negara dalam meramalkan perilaku lingkungan; (6) Ada indikasi perbedaan-perbedaan etnokultural sistematis dalam *concern* motif lingkungan dengan hubungannya pada perilaku. Perbedaan ini menyarankan implikasi-implikasi bagi perencanaan dan pelaksanaan kampanye lingkungan

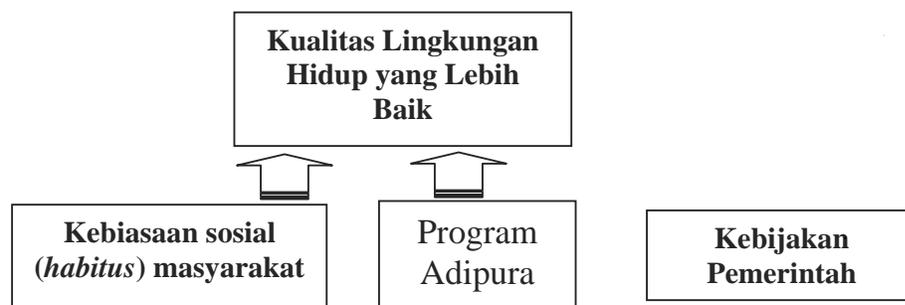
Studi yang dilakukan para pakar di luar negeri ini barangkali kebanyakan dilakukan di negara industri atau negara maju, dan belum pernah ada yang menyinggung tentang keterkaitannya dengan sebuah penghargaan terhadap kota yang menjadi lokasi penelitian.

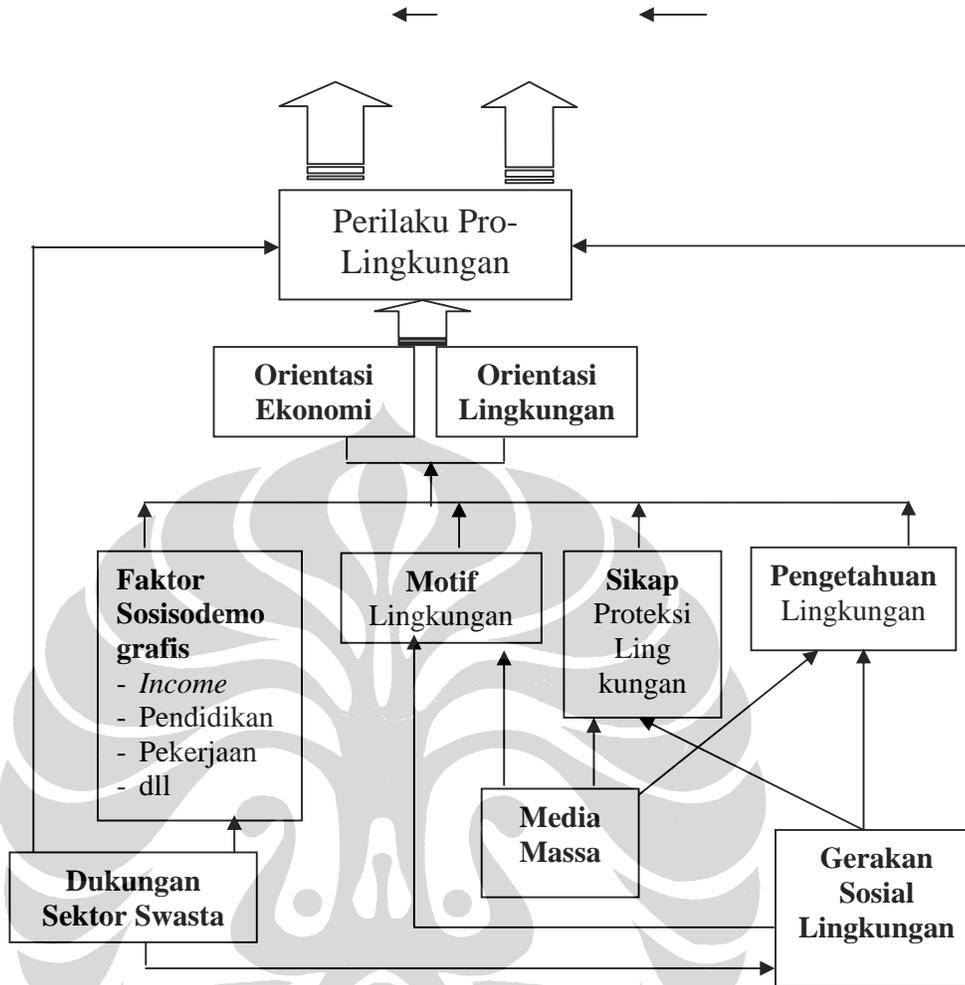
2.2.3.2 Terapan

Hasil dari studi empiris disertasi ini diharapkan dapat memberikan hasil kajian perilaku prolingkungan khususnya pada masyarakat perkotaan. Selain itu dapat memberi masukan bagi penyempurnaan program Adipura di masa mendatang berupa perumusan perencanaan dan kebijakan sosial dalam menumbuhkan gerakan cinta lingkungan dari diri masyarakat sendiri, kemudian juga diharapkan dapat membantu merumuskan strategi pembangunan sosial dikaitkan dengan pembangunan sektor lingkungan hidup.

2.2.4 Kerangka Pemikiran

Dari uraian bab-bab sebelumnya penulis mencoba merancang kerangka pikir dalam bentuk gambar dan keterangan seperti tertera pada gambar 2.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kunci utama dari kerangka pikir tersebut adalah pada aspek perilaku prolingkungan. Puncak dari semua aspek tersebut adalah terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Namun dalam penelitian ini tidak mengukur kualitas lingkungan karena untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup yang lebih baik diukur secara fisik melalui peralatan ukur air, udara, dan tanah. Perlu jangka waktu tertentu untuk mengukur baik sebelum (rona awal) maupun sesudah berjalannya suatu program/kegiatan.

Konsep lingkungan hidup paling relevan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 1997 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Bab I pasal 1 mendefinisikan: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda ,

daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya makhluk dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Untuk terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik perlu didukung oleh dua hal: (1) Kebiasaan sosial masyarakat; (2) Kebersihan fisik ruang publik melalui program Adipura. Kebiasaan sosial masyarakat dapat tercipta apabila masyarakat sudah memiliki perilaku prolingkungan. Kebiasaan mereka membuang mengelola sampah dengan sebaik-baiknya, konsumsi energi yang bertanggung jawab, perilaku bertransportasi yang baik, dan hanya membeli produk-produk yang ramah lingkungan akan mendukung terciptanya kebiasaan sosial yang baik (*habitus*).

Perilaku ini juga akan menciptakan kebersihan fisik ruang publik yang disyaratkan dalam program Adipura, sehingga masyarakat menjadi nyaman ketika berada di ruang publik. Tentu apabila masyarakat sudah berperilaku prolingkungan, tidak hanya ruang publik menjadi bersih namun juga ruang privat yang ada di lingkungan rumah masing-masing. Tetapi apakah program Adipura selama ini cukup berperan dalam menciptakan kebiasaan sosial masyarakat. Ini perlu dipertanyakan. Sebab selama ini penilaian Adipura hanya terbatas pada penilaian fisik semata. Namun kebijakan pemerintah dapat menyempurnakan program Adipura ini dengan keterlibatan masyarakat sehingga tanpa disadari akan menciptakan kebiasaan sosial yang baik pada diri masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Kerangka pikir juga menggambarkan bahwa sikap proteksi, motif, dan pengetahuan lingkungan berpengaruh terhadap perilaku prolingkungan. Hasil penelitian di Teheran menyebutkan variabel yang berpengaruh terhadap perilaku prolingkungan antara lain adalah sikap terhadap lingkungan. Sedangkan motif lingkungan mempengaruhi perilaku prolingkungan berdasarkan hasil penelitian di Selandia Baru. Unsur-unsur motif lingkungan seperti sikap altruistik, biosferik, dan egoistik ikut menentukan perilaku seseorang terhadap lingkungan.

Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi terlaksananya program Adipura ini dengan baik. Pemerintah yang konsisten dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan akan menyebabkan tingginya kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah, sehingga mereka tidak segan-segan mengeluarkan retribusi atau pajak lingkungan dengan jaminan lingkungan akan menjadi lebih baik bila dikelola oleh aparatur pemerintah. Ini yang dinamakan dengan sikap proteksi lingkungan.

Di sisi lain, media massa cukup berperan dalam peningkatan pengetahuan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik. Media massa pun dapat mempengaruhi sikap dan motif masyarakat terhadap lingkungan melalui bacaan, tontonan dan siaran radio. Dietz, Frey & Rosa (2000) mengatakan: "*The media play a direct role in shaping publics attitudes toward risk and, thereby, indirectly affect the support for social movement organizations critical of technologies*". Di lain pihak sektor swasta bahkan dapat membantu terciptanya perilaku prolingkungan secara langsung atau tidak langsung melalui peningkatan pendidikan, pendapatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ini sesuai dengan skema hipotesis ekonomi terhadap perilaku prolingkungan.

Gerakan sosial juga berperan dalam membentuk sikap dan motif masyarakat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan. Apa yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat dan gerakan sosial lainnya secara langsung atau tidak langsung dapat membentuk sikap dan motif tersebut sehingga dapat menggambarkan apakah masyarakat berperilaku prolingkungan yang baik atau malah sebaliknya. Touraine (1977) mengatakan bahwa gerakan sosial memungkinkan masyarakat membangun orientasi mereka dan mengubahnya. Oleh karena itu, kata Eder (1985), perjuangan politik dalam bentuk gerakan sosial dapat dilihat sebagai upaya untuk mengubah struktur sosial melalui pemunculan wacana alternatif (Brulle, 1996). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gerakan sosial adalah aktivitas kreatif dari masyarakat dalam membentuk diri mereka.

Dalam gambar 2 diharapkan dapat tercipta muara dari hal tersebut yakni terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lebih baik yang dapat diukur melalui parameter yang telah ditetapkan oleh instansi teknis dan selalu diukur dan dipantau secara berkala. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa dari kerangka pikir tersebut, variabel yang akan diuji statistik hanya variabel-variabel: faktor sosiodemografis, motif, sikap, dan pengetahuan terhadap perilaku prolingkungan.

2.3 Hipotesa Penelitian

Hipotesa umum penelitian sebagai berikut: "*Latar belakang sosiodemografis, sikap proteksi lingkungan, pengetahuan lingkungan, dan motif lingkungan akan mempengaruhi perilaku prolingkungan masyarakat perkotaan*". Latar belakang sosiodemografis dalam ini termasuk: umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, suku bangsa, sumber informasi lingkungan, dan lama domisili.

Sedangkan hipotesis khusus adalah sebagai berikut:

1. Semakin baik tingkat pendidikan maka akan semakin baik pula perilaku prolingkungan.
2. Semakin baik tingkat pendapatan maka akan semakin baik pula perilaku prolingkungan.
3. Pekerjaan mempengaruhi perilaku prolingkungan.
4. Motif lingkungan mempengaruhi perilaku prolingkungan.
5. Sikap proteksi lingkungan mempengaruhi perilaku prolingkungan.
6. Pengetahuan lingkungan mempengaruhi sikap proteksi lingkungan.
7. Berlakunya *The Economic Contingency Hypothesis*

Variabel agama tidak disinggung dalam penelitian ini sebab penulis merasa bahwa variabel agama adalah sesuatu yang cukup sensitif apalagi penelitian ini menyangkut masalah perilaku.